



LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN
DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG**

**LEGAL PROTECTION FOR CLIENTS
IN FACTORING AGREEMENTS**

Oleh:

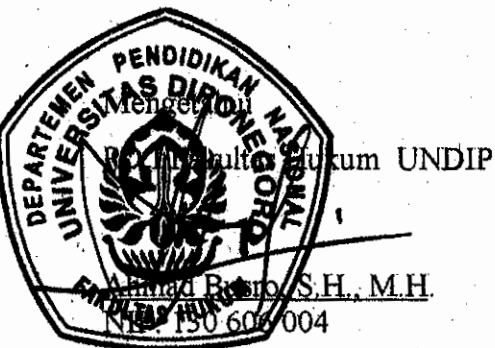
SITI MALIKHATUN BADRIYAH, S.H., M.Hum.
NIP. 132 049 780

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2000**

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

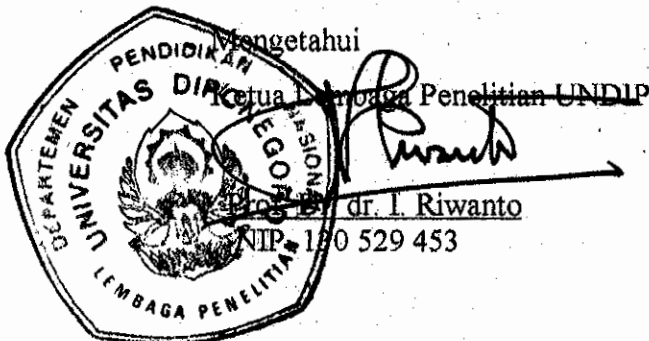
1. a. Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN
DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG
- b. Bidang Ilmu : Hukum Perdata
2. Peneliti
- a. Nama : Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.
- b. NIP : 132 049 780
- c. Pangkat/Golongan : Lektor/IIIb
- d. Fakultas/Bagian : Hukum/ Hukum Keperdataan
3. Lokasi Penelitian : DKI. Jakarta
4. Lama Penelitian : 9 Bulan
5. Sumber dana : Biaya sendiri

Semarang, 15 Desember 2000



Peneliti

Siti Malikhatun Badriyah, S.H. M.Hum.
NIP. 132 049 780



INTISARI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap klien dalam perjanjian anjak piutang merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap klien dalam perjanjian anjak piutang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan alat pengumpulan data wawancara dan kuesioner.

Lokasi penelitian dipilih di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pertimbangan bahwa perusahaan-perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam bidang anjak piutang berpusat di Jakarta, dan di daerah tersebut terdapat narasumber dari Departemen Keuangan Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pebiayaan, serta Asosiasi Leasing Indonesia. Subyek penelitian meliputi 8 Perusahaan Anjak Piutang yang ditentukan secara purposive, 34 klien yang ditentukan secara random, serta narasumber.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian anjak piutang ternyata perlindungan hukum terhadap klien cenderung diabaikan. Hal ini terlihat dari hal-hal sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum oleh Pemerintah.

Pemerintah mewajibkan Perusahaan Anjak Piutang untuk melampirkan format perjanjian anjak piutang pada waktu mengajukan permohonan ijin pendirian perusahaan, dengan maksud agar perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Anjak Piutang sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian serta prinsip dan tujuan anjak piutang, sehingga dapat melindungi para pihak. Dalam pelaksanaannya ternyata kurang ada kepastian hukum.

2. Perlindungan hukum dalam perjanjian anjak piutang.

Dalam perjanjian anjak piutang ternyata ada penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip dan tujuan anjak piutang, serta ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, karena lebih menekankan pada kewajiban klien daripada haknya, dan pada sisi lain lebih menekankan pada hak Perusahaan Anjak Piutang daripada kewajibannya. Bahkan ada hak klien yang justru menjadi hak dari Perusahaan Anjak Piutang.

3. Perlindungan hukum dalam hal terjadi sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa ternyata selalu dipakai cara musyawarah, karena para pihak lebih mengutamakan hubungan baik antara para pihak, dan menjaga nama baik perusahaan. Dalam musyawarah ini ada tiga cara penyelesaian yang telah dibakukan oleh Perusahaan Anjak Piutang, yang hanya menguntungkan pihak Perusahaan Anjak Piutang.

Kata Kunci: Perlindungan hukum klien, anjak piutang

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CLIENTS IN FACTORING AGREEMENTS

This research on legal protection for clients in factoring agreement is a normative legal research which aims to find out how clients in factoring agreements are legally protected.

The data used in this research are secondary and primary data. The secondary data were obtained from bibliografical references through a documentary study. The primary data were obtained from field study through interviews and questionnaires.

The research location is the Special Capital District of Jakarta, which was chosen with the consideration that financing companies engaged in factoring are situated in Jakarta and that resource persons are available from the Ministry of Finance Directorate for Banking and Financing Service, and the Leasing Association of Indonesia. The research subjects consist of 8 factoring companies which were purposively determined, 34 randomly selected clients, and resource persons.

From the results of the research, it is found that in the execution of a factoring agreement, legal protection for clients tend to be neglected. This fact can be seen in the following cases.

1. Legal Protection by the Government

The legal Government requires a factoring company to submit a factoring form when it puts in a request for permission to establish a company with the purpose of ensuring that the agreement made by the factoring company conforms to the principles of contractual law and the aims of factoring, thereby protecting all parties concerned. In practice, however, there is no legal certainty.

2. Legal Protection in factoring agreements

It is found that in factoring agreements there are deviations from the principles and aims of factoring, as well as imbalances between rights and responsibilities because there is more emphasis on the clients' responsibilities than on their rights on the one hand, and more emphasis on the rights of the factoring companies than their responsibilities on the other. In fact there are cases in which the rights that the clients normally deserve becomes the rights of the factoring companies.

3. Legal Protection in case of dispute

In settling a dispute it is found that the settlement is always through deliberations to reach consensus because the parties concerned prefer to maintain a good relationship and to preserve the companies' reputation. In these deliberations there are three standard ways of settlement proposed by the factoring companies, all of which only benefit the companies

Keywords: Legal protection for clients, factoring.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan hasil penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Klien dalam Perjanjian Anjak Piutang”.

Laporan hasil penelitian ini dapat tersusun berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Para narasumber penelitian:
 - a. Bapak Ir. Nugroho Agung Wijoyo, M.A. dari Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
 - b. Ibu Ari Susbiantoro selaku *Office Manager* Asosiasi Leasing Indonesia.
3. Para responden penelitian.

Teristimewa terima kasih kepada suami yang tercinta, Ahmad Syaifudin dan ananda Muhammad Shafiyuddin Wafi yang tersayang atas pengertian, perhatian dan dorongan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini. Kepada Ibunda yang tercinta, sembah sujud dan terima kasih atas doa dan restunya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan hasil penelitian ini tidak lepas dari kekurangan, karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu, semua kritik dan saran untuk penyempurnaan laporan hasil penelitian ini senantiasa akan diterima dengan terbuka dan senang hati.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
INTISARI	iii
ABSTRACT	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Perumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian	5
3. Keaslian Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Perjanjian Anjak Piutang	7
1. Pengertian Anjak Piutang	7
2. Dasar Hukum Perjanjian Anjak Piutang	11
3. Jenis-jenis Anjak Piutang	12
4. Pihak-pihak dalam Perjanjian Anjak Piutang	15
5. Persyaratan Perjanjian Anjak Piutang	16
6. Peralihan Piutang dalam Perjanjian Anjak Piutang	17
7. Bentuk dan Isi Perjanjian Anjak Piutang	19
B. Pertanggungjawaban dalam Perjanjian Anjak Piutang	23
1. Wanprestasi	24
2. Overmacht (Keadaan Memaksa)	25
C. Perlindungan Hukum bagi Klien dalam Perjanjian Anjak Piutang	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur. Salah satu bidang yang selalu dilaksanakan sejak Pembangunan Jangka Panjang Pertama hingga sekarang (Pembangunan Jangka Panjang Kedua), adalah pembangunan hukum, yang dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dalam rangka pengembangan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Proses pembaharuan hukum itu sebenarnya telah berjalan lama, namun demikian cita-cita pembentukan hukum nasional dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, belum tercapai sepenuhnya. Pembentukan hukum nasional yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang merupakan produk pembentuk undang-undang (Badan Legislatif Republik Indonesia), yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan diakui sebagai hukum (*living law*).

Hal ini tampak dalam kehidupan sehari-hari, masih ada berbagai kegiatan manusia yang sebenarnya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kondisi seperti itu dapat dipahami, karena kebutuhan kehidupan manusia sangat banyak dan beraneka ragam, serta cepat sekali berkembang, sedangkan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dapat menampung semua segi kehidupan manusia selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya.

Undang-undang itu mengatur peristiwa, tetapi seringkali peristiwanya telah berkembang jauh, sedangkan undang-undangnya belum juga berubah. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau ada ungkapan *het recht hinkt achter de feiten aan*, yang berarti bahwa hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. Yang dimaksudkan dengan hukum di sini dengan sendirinya adalah hukum yang tertulis

atau undang-undang. Perubahan undang-undang harus melalui prosedur, sehingga tidak dapat setiap saat dilakukan untuk menyesuaikan keadaan (Mertokusumo, 1996a: 99).

Pembangunan hukum di Indonesia merupakan suatu keharusan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan nasional untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan hukum tersebut harus selalu mendasarkan pada sistem hukum nasional, yang mencakup hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu dalam pengembangan hukum ini perlu dilaksanakan melalui penyempurnaan dan pengimplementasian pola pikir yang mendasari sistem hukum nasional, penyempurnaan kerangka sistem hukum nasional, inventarisasi dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dengan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (Bab IV bagian F Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN).

Dalam rangka pembangunan hukum sebagaimana digariskan dalam GBHN, maka perlu adanya masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam rangka pembaharuan hukum. Bahan masukan yang dimaksud berasal dari perilaku atau praktek yang dilakukan yang mendasari hubungan-hubungan hukum yang timbul dalam masyarakat akhir-akhir ini. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh orang banyak maka mengikat orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilakukan (*die normatieve kraft des faktischen*: Mertokusumo: 1996a: 91).

Pendapat tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa hukum itu dapat menampakkan dirinya tidak hanya sebagai peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat.

Agar suatu peraturan perundang-undangan itu berlandaskan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maka dibutuhkan bahan-bahan yang harus diperoleh secara langsung dari masyarakat, sehingga undang-undang itu benar-

benar dapat mencerminkan nilai-nilai, norma yang hidup dalam masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penelitian hukum terhadap perilaku dalam masyarakat.

Salah satu hubungan hukum yang tumbuh dan berkembang saat ini adalah perjanjian anjak piutang.

Suasana bisnis yang makin kompetitif, menuntut adanya persaingan antara pelaku bisnis. Persaingan tidak hanya dilakukan melalui harga, kualitas, dan promosi, tetapi ada salah satu cara lain, yaitu dengan pemberian kredit. Kredit ini diberikan kepada langganan maupun pembeli baru. Keadaan demikian menimbulkan masalah dalam pendanaan untuk pengembangan usaha lebih lanjut.

Dalam situasi persaingan yang makin tajam, sedangkan pengadaan permodalan sulit diperoleh dari pihak bank yang selama ini menjadi sumber pembiayaan utama, maka lembaga pembiayaan menjadi alternatif bagi penyediaan dana untuk kelancaran usaha.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, Tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disingkat Keppres No. 61 Tahun 1988), maka lembaga pembiayaan dijadikan dana pembangunan selain bank dan pasar modal.

Pertimbangan pemerintah mengeluarkan Keppres No. 61 Tahun 1988 adalah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, masyarakat memerlukan dana, dan penyediaan dana itu dipandang harus diperluas sehingga peranannya menjadi sarana sumber dana pembangunan (Simanjuntak, 1994: 1).

Dalam Pasal 1 butir 2 Keppres No. 61 Tahun 1988 dinyatakan, bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha:

- a. Sewa Guna Usaha.
- b. Modal Ventura.

- c. Perdagangan Surat Berharga.
- d. Anjak Piutang.
- e. Usaha Kartu Kredit.
- f. Pembiayaan Konsumen.

Keppres No. 61 Tahun 1988 dilanjutkan dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Anjak Piutang (*Factoring*) merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan. Dalam Pasal 1 butir 8 Keppres No. 61 Tahun 1988 diberi pengertian mengenai Perusahaan Anjak Piutang sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Hubungan hukum dalam kegiatan anjak piutang dasarnya adalah perjanjian. Perjanjian anjak piutang ini tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Masuknya perjanjian anjak piutang ke Indonesia, karena adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 K.U.H. Perdata). Perjanjian ini tunduk pada K.U.H. Perdata berdasarkan Pasal 1319, yang menentukan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.

Meskipun anjak piutang sudah diatur dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 dan peraturan pelaksanaannya, namun pengaturan ini hanya merupakan pengaturan administratif saja. Mengenai hak dan kewajiban para pihak tidak disebutkan dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu para pihak dapat menentukannya sendiri. Akan tetapi pada umumnya perjanjian anjak piutang sudah dibuat dalam bentuk standar. Perjanjian standar (perjanjian baku) ini dibuat oleh Perusahaan Anjak Piutang. Dalam hal ini hak dan kewajiban para pihak telah ditentukan oleh Perusahaan Anjak Piutang.

Sebagai pembuat perjanjian, Perusahaan Anjak Piutang lebih mudah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian bagi pihaknya. Pada lain pihak, klien tinggal menyetujui atau menolak perjanjian tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan, klien berada pada posisi yang lemah. Dalam hal ini perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi para pihak, sehingga terdapat keseimbangan.

Dalam perjanjian anjak piutang, memberikan keuntungan kepada klien, karena lebih mudah memperoleh dana untuk pengembangan usahanya, akan tetapi pada umumnya klien menghadapi perjanjian baku, yang biasanya menentukan kewajiban yang lebih berat pada pihaknya dibandingkan dengan Perusahaan Anjak Piutang. Karena ada suatu ketergantungan untuk memperoleh modal, dalam pelaksanaannya seringkali klien tidak berfikir panjang mengenai kemungkinan timbulnya kerugian yang sangat memberatkannya di kemudian hari.

Mengingat posisi klien yang dapat dikatakan berada pada pihak yang lemah tersebut, maka mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang "Perlindungan Hukum terhadap Klien dalam Perjanjian Anjak Piutang". Penelitian ini hanya difokuskan pada anjak piutang yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan di DKI Jakarta, karena Perusahaan-perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang anjak piutang sampai saat ini masih berpusat di Jakarta.

1. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas muncul permasalahan sebagai berikut.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap klien dalam perjanjian anjak piutang?

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- a. Secara Teoretis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum perdata pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya.
- b. Secara Praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pembentuk undang-undang untuk menyempurnakan

pengaturan mengenai perjanjian anjak piutang di Indonesia, serta memberikan manfaat bagi pengembangan pembangunan, khususnya di bidang hukum.

3. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai anjak piutang pernah dilakukan oleh Bagus Suksmo Djati dalam penyusunan skripsi pada tahun 1995, dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Anjak Piutang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang Non Recourse”. Penelitian lain dilakukan oleh Dwi Prilmilono Adi dalam penyusunan tesis pada tahun 1996, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pranata Anjak Piutang (Factoring) di Indonesia”.

Meskipun penelitian tentang anjak piutang ini pernah dilakukan, tetapi titik berat penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Dalam penelitian yang pertama, meneliti dari sudut Perusahaan Anjak Piutang. Perlindungan hukum terhadap Perusahaan Anjak Piutang itulah yang menjadi fokus perhatian utamanya. Di samping itu, penelitian tersebut juga membatasi pada perjanjian anjak piutang *non recourse*. Pada lain pihak, penelitian yang akan peneliti lakukan menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap klien dalam perjanjian anjak piutang, dan tidak hanya membatasi pada perjanjian anjak piutang *non recourse*, tetapi juga *recourse factoring*.

Dalam penelitian yang kedua, titik beratnya adalah tentang pranata *factoring* serta konstruksi hukum pranata tersebut dalam konsep sistem hukum Indonesia. Meskipun mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian anjak piutang disinggung dalam penelitian tersebut, namun mengenai perlindungan hukum terhadap klien tidak mendapat perhatian secara khusus. Dengan demikian, penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Klien dalam Perjanjian Anjak Piutang” merupakan penelitian yang asli.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap klien dalam perjanjian anjak piutang.